

**PERAN PEMBIAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Perbankan Syari'ah

Oleh

SEPTA IMRONI

NPM :1351020025

JURUSAN : Perbankan Syari'ah

PEMBIMBING I : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II : Ahmad Habibi, S.E., M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK
PERAN PEMBIAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU
USAHA MIKRI KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG)

Oleh
Septa Imroni

Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, yang berdiri pada tanggal 05 April 2010, yang awalnya berdiri atau beroperasi dengan prinsip atau sistem Konvensional. Setelah mendapat keputusan Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 23 juli dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-11535.AH.01.02. Tahun 2013 tentang persetujuan perubahan anggaran. BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi system atau prinsip Syariah pada tanggal 02 september 2013.

Nilai-nilai Islam merupakan seperangkat aturan corak khusus Agama Islam. Nilai akidah yang berkaitan dengan keimanan, Nilai Syariah merupakan Undang-undang Islam dan Nilai Akhlak merupakan tingkah laku yang menggambarkan keindahan. Dalam rangka berkembangnya keuangan Islam di dunia, tidak ketinggalan juga BPR Mitra Agro Usaha berkonversi menjadi BPRS Mitra Agro Usaha. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah peran pembiayaan terhadap kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pembiayaan terhadap kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di BPRS Mitra Agro Usaha. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan melakukan pendekatan ini penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan data deskripsi terkait peran pembiayaan terhadap kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 440 orang nasabah pembiayaan. Dalam penentuan sampel menggunakan teknik *sampel random/sampel acak*, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 orang nasabah pembiayaan umkm. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *interview/ wawancara*, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil temuan penulis bahwa BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah menjalankan mekanisme pembiayaan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh OJK, dan BPRS MAU telah memberikan pembiayaannya dengan tepat sasaran. sehingga para pelaku umkm di Bandar Lampung sangat terbantu masalah modal dan bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. seiring dengan bertambahnya kekuatan modal maka akan diikuti dengan omset yang tinggi sehingga akan menjamin kesejahteraan pelaku umkm tersebut. Oleh karenanya BPRS Mitra Agro Usaha selalu berbenah demi terwujudnya lembaga Islami yang bisa mengayomi serta mensejahterakan Nasabah/Masyarakat. Penulis memberikan saran, BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperkenalkan produknya kemasyarakat lebih jauh lagi jangan hanya sekitar lokasi bank saja, supaya banyak pelaku umkm yang terbantu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITA ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN PEMBIAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRI KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG)

Nama : Septa Imroni

NPM : 1351020025

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Ahmad Habibi, S.E., M.E.

NIP. 196511201992032002

NIP. 197905142003121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Ahmad Habibi, S.E., M.E.

NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)” disusun oleh Nama : **Septa Imroni**, NPM. 1351020025, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal :

Dengan Tim Penguji susunan sebagai berikut :

Ketua Sidang : **Hanif, S.E., M.M.**

Sekretaris : **Dedi Satriawan, M.Pd**

Penguji I : **Erike Anggraini, D.B.A**

Penguji II : **Ahmad Habibi, S.E., M.E.**

Dekan

Dr. Moh. Bahrudin, M.A

Nip. 195808241989031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”¹



¹ Abdul aziz, et. al. *Bukhara Tajwid dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Quran. 2007). Qs. *Al-Baqorah* : 153.

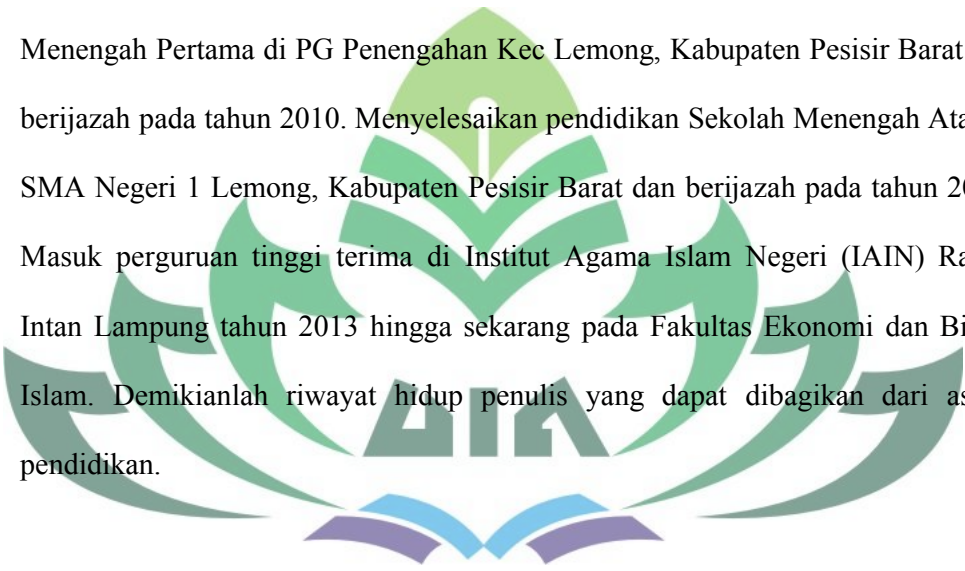
PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga dan syukur yang amat dalam kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda M. Zulhapi dan Ibunda Khoirani, yang selalu berdo'a, berjuang untuk keberhasilanku memberi cinta dan kasih sayang serta mendidikkku sehingga tahu artinya hidup dan bagai mana harus bersikap.
2. Buat adik-dan kakakku, Ena Susanti S.Pd.I., Fitri Yaini, Muhroni, Yulia Tantri, Satria Rahman, dan Dela Novia Guntari, terimakasih atas kasih sayang dan semangat kalian telah jadi bara api dalam diri, dan mudah-mudah kelak dapat mengikuti langkah-langkah dari ini bahkan harus lebih baik dari Septa. amin
3. Mbkk-mbkkku, Dewi Pakian Ratih, S.Pd, Rita Noviyanti, S.P dan Ani Lestari, S.Pd, yang selalu memotivasiku untuk tetap tegar dan sabar dalam menjalani setiap cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuanganku "Nurna, Rhosa, Ma'mun, Reza, Prasna, Darwan, Ilham" dan teman-teman angkatan tahun 2013 khususnya kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memotivasi saya dalam segala hal.
5. Almamaterku IAIN Raden Intan Lampung, Sihijau Lumut yang selalu menemani.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Septa Imroni, lahir di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 20 September 1994, anak kedua dari tujuh bersaudara, pasangan Bapak M.Zulhapi dengan Ibu Khoirani. Riwayat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), di desa Bambang Pagar dalam Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan berijazah pada tahun 2001. Melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan berijazah pada tahun 2007. Menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di PG Penengahan Kec Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan berijazah pada tahun 2010. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan berijazah pada tahun 2013. Masuk perguruan tinggi terima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung tahun 2013 hingga sekarang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.



Bandar Lampung, 19 Juli 2017

Septa Imroni

NPM. 1351020025

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SWT Robb semesta alam yang telah menciptakan manusia agar beribadah kepada – Nya. Kita memuji, meminta tolong, memohon ampun dan berlindung pada – Nya dari keburukan diri kita dan kejahatan amalan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang akan menjadi penolong dan penuntunnya. Kita bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba hamba dan utusan – Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin – Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan shalawat dan salam atas *Rosulullah Shallahu alaihiwa Sallam* dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul : **“PERAN PEMBIAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRI KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG)”**, dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Keberhasilan ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa bimbingan, dukungan, do’a dan bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan seluruh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan FEBI IAIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Bapak A.Zuliansyah,S.Si.,M.S.I. yang telah memberikan saran, masukan dan perhatian selama ini.
4. Ibu Dr. Heni Noviarita, S.E., M.S.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E.yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktunya.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
6. Staf perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan Karya ilmiah ini.
7. Direktur Utama Bapak Mat Amin S.E.Akt beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kerja sama hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin *Ya Robbil 'Alamin*. Penulis menyadari penelitian ini masih

terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran – saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Robbal ‘alamin.*

Bandar Lampung, 19 Juli 2017

Septa Imroni

NPM. 1351020025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Alasan Memilih Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 17
A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah.....	17
1. Perbankan Syariah	17
2. Tujuan Perbankan Syariah.....	19
3. Jenis Perbankan Syariah	21
4. Pengertian BPRS.....	23
5. Modal Pendirian BPRS	25
6. Organisasi Manajemen BPRS	29
7. Tujuan dan Strategi Usaha BPRS	31
8. Produk-produk BPRS.....	31
B. Tinjauan Pembiayaan.....	35
1. Pengertian Pembiayaan	35
2. Tujuan Pembiayaan	37
3. Fungsi Pembiayaan	40
4. Jenis-jenis Pembiayaan	41
5. Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah.....	44
C. Tinjauan Umum Umkm	47
1. Pengertian UMKM.....	47
2. Asas-asas UMKM	48
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM	50
4. Kriteria-Kriteria UMKM.....	51
5. Aspek Pendanaan dan Pembiayaan UMKM	52
6. Aspek sarana dan Prasarana Serta Informasi UMKM	54
D. Tinjauan Umum Kesejahteraan.....	55
1. Pengertian Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	55
2. Indikator Kesejahteraan.....	57

E. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan	62
1. Pengertian Ekonomi Islam	62
2. Pengertian Kesejahteraan (falah) Dalam Ekonomi Islam	63
3. Indikator Kesejahteraan masyarakat Dalam Ekonomi Islam ...	69
F. Penelitian Terdahulu.....	73
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN.....	78
A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha	78
1. Sejarah berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha.....	79
2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha	79
3. Struktur Pengurus BPRS Mitra Agro Usaha	79
4. job Description.....	81
5. Prinsip Utama Operasional PT. BPRS MAU	85
6. Usaha Yang Dijalankan PT. BPRS MAU	85
7. Produk Tabungan BPRS MAU.....	86
8. Mekanisme Pembiayaan di BPRS MAU	89
B. Karakteristik Responden	93
a. Usia Responden	93
b. Pendidikan Responden Terakhir.....	94
c. Jenis Kelamin.....	94
d. Penghasilan Responden.....	95
C. Karakteristik Jawaban Responden.....	96
a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	96
b. Pembiayaan.....	98
c. Kesejahteraan.....	100
BAB IV ANALISIS DATA	103
A. Mekanisme Pembiayaan Di Bprs Mau	103
B. Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)	106
C. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Distribusi jawaban responden berdasarkan usia	93
2. Distribusi jawaban responden berdasarkan pendidikan terakhir	94
3. Distribusi jawaban responden berdasarkan jenis kelamin	95
4. Distribusi jawaban responden berdasarkan penghasilan perbulan	95
5. Jawaban responden tentang BPRS	96
6. Jawaban responden tentang pembiayaan	98
7. Jawaban responden tentang kesejahteraan Bapak/Ibu	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

- | | |
|--|----|
| 1. Struktur organisasi BPRS Mitra MAU..... | 80 |
| 2. Mekanisme pembiayaan di BPRS MAU..... | 91 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kesediaan Memberikan Izin Penelitian/ Survey.
2. Alat pengumpulan data/kuesioner/
3. Photo-photo bukti penyebaran kuesioner kenasabah.
4. Surat Konsultasi.
5. Surat Pernyataan Tidak Plagiat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul ialah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme dalam pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, khususnya pembiayaan murabahah, sehingga masyarakat belum mengetahui pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Ingin mengetahui perubahan kesejahteraan masyarakat UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
3. Ingin mengetahui kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif sebagai salah satu solusi alternatif terhadap suatu persoalan.¹ Pertentangan antara bunga bank dengan riba sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2):275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”²

Dengan demikian, kerinduan umat islam indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Setelah diundangkannya Undang-Undang yang khusus bagi kehidupan perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditambah dengan berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah, yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang perbankan syariah tersebut, maka dasar hukum bagi

¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 1

² Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 260.

eksistensi dan pengembangan perbankan syariah memperoleh daya dorong baru yang sangat kuat. Diharapkannya dengan telah diundangkan nya Undang-Undang Perbankan Syariah, jumlah bank-bank syariah di Indonesia akan lebih banyak, selain bertambahnya jumlah bank-bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah.³

Pada saat ini perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sangat marak seperti yang terjadi di negara-negara lain, menurut deputi gubernur Bank Indonesia, Siti Ch. Fadrijah, pertumbuhan perindustrian perbankan syari'ah terbilang sangat fantastis meskipun ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%. Untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam kerangka dual-banking system (sistem perbankan ganda) dalam kerangka arsitektur perbankan indonesia (API) dengan tujuan untuk menghadirkan jasa perbankan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sebagian besar adalah orsng muslim. Dengan demikian, diharapkan agar perbankan syari'ah dan perbankan konvensional secara sinergis dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁴

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2014), h. vii.

⁴ Ibid, h. 97.

Bank Syari'ah di Indonesia, menurut pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syari'ah. Demikian ditentukan menurut pasal (5) ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Yang akan menjadi fokus dalam hal ini adalah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Menurut pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syari'ah, BPRS meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain, bisa juga dengan cara investasi berupa deposito atau tabungan dengan bentuk lainnya.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan lainnya.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal bank perkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.⁶

⁵ Ibid, h. 106.

⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014), h 46.

Dengan adanya BPRS akan memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BPRS kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil.

Sebagaimana dimaklumi 97% usaha kecil di Indonesia memiliki omset dibawah Rp 50 juta/tahun, meskipun batas atas omset usaha kecil adalah 1 miliar. pada dasarnya jika Indonesia ingin menjangkau usaha kecil terutama usaha kecil-kecil atau usaha mikro tersebut semestinya secara khusus mengarahkan perhatiannya pada kelompok ini karna mereka mewakili lebih dari 33 juta pelaku usaha. sampai saat ini belum terlihat adanya program khusus pemberdayaan usaha mikro, padahal lapisan inilah penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. dalam setiap usaha pemberdayaan usaha kecil setelah ada tiga aspek penting perlu dikembangkan, yaitu: pertama, lingkungan kondusif dan sistem administrasi pemerintahan yang mendukung. kedua, dukungan non finansial berupa jasa pengkreditan. ketiga, dan dukungan finansial yang khusus ditujukan pada usaha kecil. Di sub-sektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha pedagang eceran yang tidak berbadan

hukum yang diwakili oleh 5.2 juta unit usaha hanya memiliki omset di bawah Rp 5 juta/tahun, sehingga jumlah usaha ekonomi rakyat lapis bawah ini benar-benar dengan skala gurem. program yang secara bersinggungan mencoba mengatasi masalah ini pada umumnya masih dikaitkan dengan program penanggulangan kemiskinan. untuk tidak mencampuradukkan permasalahan, maka tawaran pendekatan yang dapat kita manfaatkan adalah dengan melihat sisi kehidupan masyarakat ini dari dua sisi: pertama, sebagai produk aktif maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa harus kita perlakukan sebagai usaha mikro sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan produktifitas dan kapasitas produktifnya. kedua, sebagai rumah tangga konsumen setiap pendapatan/pengeluaran masyarakat yang masih belum melampaui batas garis kemiskinan harus kita perlakukan sebagai penduduk miskin yang harus kita tingkatkan kondisi kehidupannya hingga melewati batas tersebut.⁷

Seperti dilansir Antara News.Com, masyarakat mengharapkan perizinan usaha semakin mudah sehingga akan bertambah pesat peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM di daerah Lampung. Warga provinsi Lampung berharap, bantuan pemerintah terkait penambahan modal usaha terus ditingkatkan agar dapat menunjang kesejahteraan para pelaku UMKM. Hal serupa juga di utarakan oleh pedagang kue tradisional, Dito Dwi menyebutkan perizinan usaha serta modal yang masih sering menjadi kendala para pelaku

⁷ Rivai.Veithzal, Dkk , Manajemen Kelembagaan Keuangan, (Depok : Raja Grafindo Persada), 2013 hal 700

usaha kecil di Lampung.⁸ Salah satu sebabnya adalah ketiadaan pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lapisan bawah ini. Dengan adanya pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat. Usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok yang kemampuan permodalan UMKM rendah. Kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersil membuat UMKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Dikarenakan BPRS tersebut sangat dekat dengan kalangan pelaku UMKM. Pelaku usaha mikro yang terdekat dari BPRS MAU adalah para pedagang pasar tugu. Sehingga, Peneliti akan sangat mudah untuk mengakses para nasabah dari BPRS MAU. Oleh karna itu penulis membuat karya ilmiah skripsi dengan judul : “Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji, sehingga timbul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan BPRS Mitra Agro Usaha?
2. Bagaimanakah peran BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap kesejahteraan pelaku UMKM ?

⁸ <http://m.antaranews.com/berita/459832/umkm-lampung-harap-presiden-joko-widodo-tingkatkan-pasar-nasional>

⁹ Ibid, hl. 701

3. Bagaimanakah kesejahteraan pelaku UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui peran BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap kesejahteraan UMKM.
3. Untuk mengetahui peran pembiayaan terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif Ekonomi Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi manajemen BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam mengelola pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kemajuan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Untuk Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.

3. Untuk Peneliti

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan, menambah perbendaharaan pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis.¹⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 6.

adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.¹¹

Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana pembiayaan terhadap kesejahteraan usaha mikro yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari :

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari dokumen dan wawancara langsung dengan karyawan BPRS Mitra Agro Usaha beserta nasabahnya yang terkait tentang pembiayaan UMKM yang terdapat pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹³ Sedangkan yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad- akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta,: Bumi Aksara, 2013), h.44.

¹² Ibid, h. 225

¹³ Ibid, h. 225

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya¹⁴. Dalam penelitian ini populasi adalah Usaha Mikro yang memperoleh pembiayaan dari BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Dipilihnya BPRS ini karena banyak UMKM yang telah berhasil menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Populasi pembiayaan di BPRS MAU sebanyak 1009 pembiayaan dari awal tahun 2014 sampai sekarang. Yang terbagi dalam tiga macam pembiayaan:

- a. Piutang murabahah kolektif sebanyak 316 nasabah.
- b. Piutang Murabahah umum sebanyak 440 nasabah.
- c. Piutang Multijasa sebanyak 253 nasabah.

Dalam hal ini peneliti memberikan batasan masalah hanya akan memfokuskan penelitian terhadap pembiayaan murabahah umum yang memiliki populasi sebanyak 440 nasabah pembiayaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua data yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel

¹⁴ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 80.

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Penentuan sampel dalam penelitian salah satunya adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.¹⁵ Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. tetapi, jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti.¹⁶

Peneliti akan mengambil sebanyak 10% dari populasi yang ada:

$$n = N \times e$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Standart eror (10%)

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = 440 \times (10\%)$$

$$n = 44$$

Dengan menggunakan rumus diatas didapat jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 44 orang.

Jadi sampel dari penelitian ini sebanyak 44 nasabah pembiayaan beserta karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling, dimana sampel diambil secara acak.¹⁷ Penggunaan Random Sampling karena nasabah

¹⁵ Ibid, h. 90

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

¹⁷ Ibid, h. 82

Pembiayaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak mungkin dapat disusun secara teratur dan melakukan pengumpulan data secara teratur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Obsevasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui obeservasi. melalui observasi peneliti belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.¹⁸ Dalam teknik observasi peneliti akan langsung meninjau langsung lapangan memantau situasi dan kondisi yang ada dilapangan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.¹⁹ Dengan cara ini peneliti akan membagikan kuesioner kepada responden dengan pilihan jawaban YA atau TIDAK, sehingga jawaban responden dapat memberikan hasil yang baik bagi penelitian ini.

¹⁸ Ibid, h. 226.

¹⁹ Ibid, h. 142

c. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁰ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat fleksibel, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak yang ada dalam BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, sekaligus nasabah yang terkait dengan pembiayaannya.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

²⁰ Ibid, h. 231.

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar misalnya photo, gambar hidup , sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya seni yang dapat berupa gambar, patung , film dan lain-lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
- 2) Koding, adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
- 3).Tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel, jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukan dalam tabel.²²

b. Analisis Data

²¹ Ibid, h.240.

²² Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta,: Bumi Aksara, 2013), h. 154.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain. analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan..²³



²³ Op.Cit, h. 244.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1. Perbankan Syariah

Syariah adalah ketentuan-ketentuan dari Allah mengenai bagaimana hamba Allah seharusnya berperilaku dan bagaimana seharusnya sikap kalbunya. Mengenai sikap kalbu terutama sangat diwarnai oleh niat hamba Allah itu dalam menghadapi keadaan, kejadian, orang atau orang-orang lain, atau lingkungan hidupnya tersebut, serta dalam berhubungan dengan Allah.

Al-Qur'an dalam surah al-Maaidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاتَّبِعْهُ بِحَقِّهِ ۚ إِنَّمَا لِكُلِّ فِرْقٍ شَرْعٌ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَادِثًا وَنَذِيرًا ۚ وَاللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

Syariah meliputi dua bagian utama yaitu:

- a. Ibadah, adalah ketentuan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya ketentuan mengenai sholat, zakat, puasa, naik haji, melakukan umrah.
- b. Muamalah, adalah ketentuan yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungannya. Misalnya ketentuan mengenai pernikahan, perdagangan, hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.²⁴

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.²⁵ Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank yang demikian itu disebut pula “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadia Group. 2014. hlm 123

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 3.

Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.²⁶

2. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim. Suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan komunikasi meskipun sistem Islam telah memiliki di dalamnya pencegah untuk menangani masalah ini. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan

²⁶ Op.Cit. hlm 32

pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁷ Berbicara tentang tujuan, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan. Di antara tujuan bank syariah adalah Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas dan segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.²⁸

Secara khusus tujuan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.

²⁷ Ibid, Sultan Remy Sjahdeini, hlm 33.

²⁸ Op.Cit, Muhammad, hlm, 7.

- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zkat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).²⁹

3. Jenis Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian ditentukan menurut Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syariah.³⁰

Kegiatan usaha bank umum syariah, sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain.

²⁹ Ibid, Muhammad, hlm 10.

³⁰ Op.Cit, Sultan Remiy Sjahdeini, hlm. 102.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah atau akad lain.
- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna atau akad lain/
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain.
- f. Menyalurkan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk akad IMBT
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain.
- h. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial.³¹

Kegiatan usaha UUS hampir sama dengan BUS, hanya saja terdapat beberapa perbedaan, seperti UUS tidak menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, juga tidak menerbitkan, menawarkan atau memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.³²

4. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk

³¹ Ibid, Sultan Remiy Sjahdeini, hlm. 103.

³² Ibid, Sultan Remiy Sjahdeini, hlm. 105.

³³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 39.

hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana saja dengan badan hukum berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

5. Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) modal yang disetor menurut PBI No. 11/23/PBI/2009 ditetapkan sekurang-kurangnya:

- a. Rp. 2000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi.
- b. Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi diluar wilayah diatas.
- c. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan huruf b.

Menurut pasal 2 PBI No. 11/23/PBI/2009, bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas, pasal 3 menjelaskan BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar

³⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 62.

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:

- a. Calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham
 - b. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia
 - c. Tugas wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan dengan dewan komisaris , Direksi dan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
 - e. Rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh komisaris utama.
- perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh direksi BPRS Bank

Indonesia paling lambat 10 hari setelah diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

Setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

Menurut Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2006, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, Pasal 3 menjelaskan, BPRS harus memiliki

anggaran dasar yang saling memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank
- b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.³⁵

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip tersebut, pada bank islam dan BPRS harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang cukup ketat, antara lain harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
- b. Data kepemilikan
- c. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.
- e. Rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama.
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan)
- g. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan.

³⁵ Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005, hlm, 64.

- h. Sistem dan prosedur kerja.
- i. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor.
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain. tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (money laundering).³⁶

Menurut Pasal 7 PBI No. 11/23/PBI/2009, permohonan persetujuan prinsip BPRS sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a, diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai antara lain:

- a. Akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar.
- b. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
- c. Daftar calon anggota dewan komisaris, anggota direksi dan anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia.
- d. Studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar.
- e. Rencana bisnis (business plan).

³⁶ Ibid, hlm. 66

- f. Bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.³⁷

Selain itu, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian bank.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- a. Penelitian atau kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- b. Wawancara terhadap pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam hal terdapat pengganti atas calon yang diajukan sebelumnya.
- c. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.

Pelaksana kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambay-lambatnya 10 hari tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu ditentukan bank belum melaksanakan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib

³⁷ Ibid, hlm. 67

mencantumkan secara jelas kata “syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan umumnya.³⁸

6. Organisasi Manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dilihat dari segi kepemilikan BPRS dapat digolongkan dalam 3 golongan yakni:

- a. Milil Pemerintah Daerah (PD)
- b. Milik Perseroan Terbatas (PT)
- c. Kepengurusan dilakukan oleh dewan direksi atau pimpinan dengan diawasi oleh suatu dewan komisaris atau dewan pengawas atau badan pengawas atau badan pemeriksa, tergantung dari bentuk hukumnya.
 - 1) Bagi yang berbentuk PD, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan pengawas yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah/peraturan daerah.
 - 2) Bagi yang berbentuk hukum PT, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/anggaran dasar.
 - 3) Bagi yang berbentuk hukum operasi, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus dilakukan oleh badan pemeriksa yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota/anggaran dasar.

³⁸ Ibid, hlm. 69

- a. Bagi anggota direksi/pimpinan suatu bank tidak diperkenankan merangkap suatu jabatan aktif diluar bank, dengan maksud agar direksi dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semata-mata untuk kemajuan usaha banknya. disamping itu, pimpinan bank harus bertempat tinggal di tempat dan atau yang berdekatan dengan tempat kedudukan bank.
- b. Untuk melindungi kepentingan para nasabah dan terlaksananya pengelolaan bank oleh direksi/pimpinan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, maka dewan komisaris/dewan pengawas/badan pemeriksa dari setiap bank, wajib menjalankan tugasna dengan penuh tanggung jawab.
- c. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan bank kepada para pemilik/pemegang saham/anggota.
- d. Untuk menjaga kepemilikan kepengurusan, ada pada orang-orang yang tepat dalam pengertian warga negara RI dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemegang saham atau anggota, serta pimpinannya terdiri dari warga negara Indonesia dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, maka:
 - 1) Setiap pengeluaran saham baru atau pemindahan saham wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - 2) Setiap pengangkatan pengurus bank harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.³⁹

³⁹ Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 136

7. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan dari pendirian BPRS ini adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi.⁴⁰

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:

- a. BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.⁴¹

8. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Rahmadi Usman, Aspek Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Pertama, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 468

⁴¹ Ibid, hlm. 468

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti penerimaan simpanan wadi'ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (OHN), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pembelian rumah, kendaraan dan lain-lain.

1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee accaount) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. akad penerimaan titipan ini adalah wadi'ah, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nassabah.

2) Tabungan wadi'ah

Bank menerima tabungan (saving account), bank pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. akad penerimaan dana ini adalah wadi'ah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar profit kepada penabung diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito wadi'ah atau Deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka (time and investment accaount), baik pribadi maupun badan/lembaga. akad penerimaan deposito adalah wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana

masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya wadi'ah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntutngan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran dana

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian secara pengusaha dengan baik, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

3) Pembiayaan bai bitsaman ajil

Pembiayaan bai bitsaman ajil adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan dikemudian nasabah akan membayara harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). murabahah hampir sama dengan bai'at salam (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) Pembiayaan qardhul hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima harusnya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIZ. Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

c. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. bank juga

mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya (bridging financing) yang didasarkan atas akad pembiayaan bai salam.⁴²

B. Tinjauan Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sistem penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya pemberian kredit bank konvensional ke nasabahnya, kredit atau pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga maupun nasabah.⁴³

Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa[4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

⁴² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Op. Cit., hlm. 45

⁴³ Kamsir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm 73

⁴⁴ Veithzal Rifai dan Andria Pertama, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 3.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁵

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis. Untuk itu, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua kata yang berkaitan dengan pembiayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat.

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktifitas berupa

⁴⁵ Ibid, hlm. 333

pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktivitas produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktivitas produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁴⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

⁴⁶ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005. hlm, 16

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produksi, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya ,masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahannya. penghasilan merupakan bagian pendapatan masyarakat. jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan rasio, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alamnya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁴⁷

Sehubungan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:

⁴⁷ Ibid, Muhammad. hlm, 18

- a. Pemilik, dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat:
 - 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - 3) Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- d. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- e. Bank, bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.⁴⁸

3. Fungsi Pembiayaan

⁴⁸ Ibid, Muhammad. hlm, 19

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya.
- b. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.⁴⁹

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan:

⁴⁹ Ibid, Muhammad. hlm 20

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁵⁰

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk dalam bentuk aktiva produktif dan aktifa tidak produktif, yaitu:

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan mudharabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

⁵⁰ Ibid, Muhammad, hlm. 22

b) Pembiayaan musyarakah, adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan murabahah, adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b) Pembiayaan salam, adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c) Pembiayaan istishna, adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, untuk pembiayaan jenis ini dikalsifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina, yaitu perjanjian sewa neyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman qardh. Pinjaman qardh atau tabungan adalah penyediaan dana dan/tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan melakukan embayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵¹

5. Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah⁵²

a. Pengajuan pembiayaan

Calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan atau mengajukan surat permohonan pembiayaan, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh bank.

b. Verifikasi dokumen calon nasabah

- 1) Pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah
- 2) Pihak bank akan melakukan analisa terhadap halhal sebagai berikut:
 - a) profil usaha nasabah atau profil nasabah.
 - b) profabilitas usaha.

⁵¹ Ibid, Muhammad, hlm. 25

⁵² <http://OJK.go.id>

c) analisa arus kas usaha (dan/atau arus pendapatan nasabah) dan laporan keuangan.

d) melakukan analisa yuridis.

3) Pihak bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan.

3) Pihak bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.

c. Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

1) Pihak bank akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan

2) Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan surat persetujuan prinsip Pembiayaan kepada calon nasabah (*offering letter*)

3) Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak Bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah.

d. Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan

1) Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, Nasabah diminta datang ke Bank untuk melakukan pengikatan

2) Pihak Bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan

3) Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan Bank

- 4) Setelah pengikatan dilakukan, Bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan
- e. Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan
 - 1) Sebelum *setting* fasilitas pembiayaan, Nasabah dan pihak Bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul
 - 2) Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
 - a) Biaya Administrasi
 - b) Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan)
 - c) Biaya Asuransi Kebakaran
 - d) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan)
 - e) Biaya Notaris
 - f) Biaya Penilaian Jaminan, dan
 - g) Biaya Materai
- f. Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah
 1. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima Nasabah.
 2. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh Nasabah maka proses pengadaan Bank dilakukan setelah Nasabah diberikan kuasa wakalah.
 3. Bank menentukan plafond pembiayaan yang merupakan harga pokok bank yang antara lain dapat berupa nilai harga penyediaan barang atau nominal pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka.

g. Pembayaran Angsuran

1. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal Pembayaran angsuran yang telah disepakati
2. Pembayaran pengembalian dana Bank dilakukan Otomatis ketika terdapat dana di rekening Nasabah

h. Pelunasan Pembiayaan

1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:
 - a) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan,
 - b) Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh Tempo fasilitas pembiayaan
2. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran Dana sesuai dengan sisa dana angsuran
3. Setelah seluruh kewajiban Nasabah lunas maka Pihak Bank akan melakukan pelepasan jaminan Dan penghentian permintaan angsuran.

C. Tinjauan Umum Pelaku UMKM

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁵³ Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang

⁵³ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hlm 16

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung.

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia yang mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat At-Taubat ayat 105 :⁵⁴

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan akan terus terlihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman.

2. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya , Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002. hlm 273.

Berdasarkan Bab II, pasal 2 beserta penjelasannya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, asas-asas UMKM diantaranya:

- a. Asas Kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas Demokrasi Ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan berdasarkan kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- b. Asas Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Asas Efisiensi Berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- d. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

- e. Asas berwawasan lingkung, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- f. Asas kemandirian,, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- g. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- h. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁵

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

a. Prinsip pemberdayaan UMKM:

- 1) Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- 4) Peningkatan daya saing UMKM.

⁵⁵ Leonardus Saiman, Kewirausahaan, Cetakan pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 8

- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

b. Tujuan pemberdayaan UMKM

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan.

4. Kriteria-kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM antara lain:

a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-.

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- .

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-.

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.⁵⁶

5. Aspek Pendanaan dan Pembiayaan UMKM

a. Aspek Pendanaan

Berdasarkan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek pendanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- 1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- 2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh UMKM.

⁵⁶ Ibid, Leonardus Saiman, hlm. 9

- 3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membantu para pelaku usaha dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

b. Pembiayaan UMKM

Sebagaimana pasal 21 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek pembiayaan UMKM diatur:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
- 2) Badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 3) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber

pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.

5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.⁵⁷

6. Aspek sarana dan prasarana serta informasi UMKM

a. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pasal 8 UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, aspek pendanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- 1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil.
- 2) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam penjelasan Pasal demi pasal UU No 20 tersebut, Pasal 9, huruf b yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan pemerintahan dan pemerintah daerah, baik yang secara langsung dengan memberikan keringanan.

b. Informasi UMKM

⁵⁷ Ibid, Leonardus Saiman, hlm. 10

Berdasarkan Pasal 10 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- 1) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis.
- 2) Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain dan teknologi dan mutu.
- 3) Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Kesejahteraan.

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.⁵⁹ Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kesejahteraan adalah aman, sentosa, dan makmur sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. keamanan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga seseorang maupun golongan. Adapun keselamatan merupakan keadaan

⁵⁸ Ibid, Leonardus Saiman, hlm. 12

⁵⁹ W.J.S Poerwadinata, Pengertian Kesejahteraan Manusia, Bandung:Mizan, 1996, hlm.

meliputi terlindung dari masalah fisik, sosial, keuangan, politik perasaan, pekerjaan, psikologis, perkara-perkara lain yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya dijamin oleh jaminan atas asuransi. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhnya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *cater* yaitu berarti payung, artinya adalah orang yang sejahtera adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁶⁰ Sedangkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuh kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniyah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁶¹

Menurut Arthur Dunham Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.⁶²

⁶⁰ Adi fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung, Rafika Aditama, 2012, hlm. 8

⁶¹ Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (31)

⁶² Adi Fahrudin, Op.Cit, hlm. 28

Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dari lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka kembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.⁶³

Umar Chapra Menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-bayyah al-tayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler materialistik.⁶⁴

Dari beberapa definisi kesejahteraan masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam dimensi material maupun maupun spiritual.

2. Indikator Kesejahteraan

⁶³ Universitas Sumatera Utara, Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial (online) tersedia di <http://responsitori.usu.ac.id>

⁶⁴ M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta, Ekonis, 2003, hlm. 7

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan moneter menunjukkan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan pada indikator moneter. Oleh karena itu, Becermon membedakan indikator kesejahteraan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan Nasional, yang dipelopori oleh Collin Clark, Gilbert dan Kanvis.
- b. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan tingkat konsumsi, yang dipelopori oleh Bennet.
- c. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dengan mempertimbangkan perbandingan harga di setiap negara.⁶⁵

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu : anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di

⁶⁵ Bahrudin dan Rudy, Ekonomi Otonomi Daerah, Yokyakarta, UPPSTM YKP, 2002, hlm. 48

rumah,sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (pasangan usia subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas serta diberi cara KB modern.⁶⁶

Dari beberapa definisi tentang indikator kesejahteraan di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material. Menurut hasil SPKPM 2009 tingkat pendapatan perbulan yang dikatakan sejahtera adalah:

- 1) Tinggi (> Rp. 5000.000.)
- 2) Sedang (Rp.1000.000.-Rp. 5000.000)
- 3) Rendah (< Rp.1000.000)

b. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan

⁶⁶ Sub Direktorat Analis Statistik, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, hlm. 14

mengidentifikasi rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi untuk makan terhadap keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan atau $<80\%$ dari pendapatan. Dengan demikian rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang tua terhadap perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan tidak menggantungkan diri terhadap orang lain. Sedangkan sebagian besar masyarakat moderen memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah dan orang tua untuk mempertahankan nilai-nilai luhur guna mematuhi norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut biro pusat statistik (BPS)

dikatakan perumahan dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap dalam kategori sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

e. Kesehatan

Adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan bagi setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah Indes Pembangunan Manusia (IPM). Indes tersebut adalah indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatanm pendidikan, serta ekonomi. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan meliputi:

- 1) Pangan, diisyaratkan dengan pemenuhan gizi minimum, yaitu perkiraan kalori dan protein 2100/kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan penutup kepala.
- 3) Kesehatan, diisyaratkan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyisihan obat-obatan dirumah, biaya dokter dan perawatan.⁶⁷

Dari indikator-indikator di atas maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang

⁶⁷ Ibid, hlm. 18

mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan dapat membawa korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pembangunan haruslah diorientasikan pada seluruh aset bangsa, dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

E. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-iqtisad yang berarti kesederhanaan dan kehematan menurut Ali Anwar Yusuf ekonomi adalah : “Kajian mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta usaha mendistribusikannya”.⁶⁸

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan berlandaskan syariah Islam.

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat : 168,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁶⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi), (Jakarta, Bumi Aksara, 2009) h. 325

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”⁶⁹

Dalam ayat lain Surat al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT berfirman:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonommi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, Namun juga merupakan perwujudan prilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan mampu menjadi cerminan prilaku masyarakat muslim itu sendiri.

2. Pengertian Kesejahteraan (falah) Dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan

⁶⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung. CV. Diponegoro, 2005).

kemenangan dalam hidup.⁷⁰ Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.⁷¹

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:⁷²

a. Kesejahteraan holistic dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di

⁷⁰ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). h. 2

⁷¹ Ibid, h. 6

⁷² Ibid, h. 4

dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidaknya adanya hubungan manusia dengan tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.⁷³

Syahminan Zaini dan Ananto Kusuma Seta menjelaskan, bahwa suksesnya juga kekhilafahan itu minimal tujuh syarat harus dipenuhi oleh manusia, yaitu:⁷⁴

- 1) Badan kuat.
- 2) Terampil.
- 3) Pandai berhubungan dengan Allah (dalam bentuk ibadah) dengan manusia (dalam bentuk penelitian, pengelolaan dan pemanfaatan).
- 4) Beriman dan beramal saleh.

⁷³ Suryadi Efendi, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi" (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35

⁷⁴ Ibid, h. 36

- 5) Berilmu pengetahuan yang banyak dalam segala bidang kehidupan manusia.
- 6) Bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan melaksanakan semua itu.
- 7) Berdisiplin tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kesejahteraan berdasarkan pandangann islam itu adalah dengan melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani meliputi:

- 1) Pembangunan kekuatan jasmani.
- 2) Pembangunan kesehatan jasmani.
- 3) Pembangunan keterampilan jasmani.
- 4) Pembangunan keindahan jasmani.

Sedangkan pembangunan rohani meliputi:

- 1) Pembangunan martabat manusia.
- 2) Pembangunan fitrah manusia.
- 3) Sifat-sifat manusia.
- 4) Tanggung jawab manusia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. Agama (al-dien), hidup atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal), intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya. Ia

mendefenisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarkiutilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan dan kenyamanan (hajiyat) dan kemewahan (tahsiniyat).⁷⁵

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antarlain dalam peringatan Allah swt kepada adam,terdapat dalam Al-Quran surat Thahaa 117-119:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١٧
إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

١١٩

Artinya : “Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”⁷⁶

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:⁷⁷

- a. .keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran

⁷⁵ Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 62

⁷⁶ Departemen Agama, Op., Cit, h. 320

⁷⁷ Ruslan Abdul Ghopur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta Pusat Pelajar, 2013), h. 10

- b. pertanggungjawaban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintahan berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (the need/haji), maupun tersier (the commendable/tahsini), dan pelengkap (the luxury kamili). Disebabkan hal tersebut, Pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha mencakupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁷⁸

Dalam ekonomi islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan shadaqah dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu sandang, pangan, papan, dapat terpenuhi secara kesinambungan.

⁷⁸ Ibid, h. 80

sedangkan suatu keadaan terjaga terlindungnya agama ,harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi islam, perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari (lima) hal,yaitu :

1. Keimanan (ad-dien)
2. ilmu (al-ilm)
3. kehidupan (an-nafs)
4. harta (al-maal) dan
5. kelangsungan keturunan (an-nash).

Kelima merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. syariat islam bertujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. ada 5 (lima) masalah dasar sebagai bagian dari maqasd al syari'ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia,yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak

terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.

Kesejahteraan (falah) manusia dalam islam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.⁷⁹ penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia.

selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima di atas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

- b. Hayiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika suatu yang mestinya ada menjadi tidak ada hayiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maashid Al-Syariah, (Bandung, Kencana, 2011), h. 164

- c. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. tahsiniyat juga bisa dikenal dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Pembagian maqasid al-syari'ah menurut al-syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dielihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. pertama, dharuriyat jenis maqashid ini merupakan kemandirian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia,

Yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kedua, hajiyat. jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan. Menghilangkan kesulitan atau menjadikaneliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. ketiga, tahsiniyat. tujuan maqashid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

Kolerasi antara dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat disimpulkan oleh al-syatibi yaitu maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat, kerusakan pada

maqashid hajiyyat dan maqashid tahsiniyat bersifat absolut, masalah dan maqashid al-syariah dalam pandangan al-syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam. masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.⁸⁰

indikator sejahtera menurut islam merujuk kepada Al Quraisy allah SWT:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: “ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”⁸¹

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. menyembah tuhan (pemilik ka’bah) makna tauhid bahwa proses mensejahterakan masyarakat sejahtera secara fisik, makna terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar benar menjadikan allah swt. sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik.
- b. Menghilangkan lapar. Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada

⁸⁰ Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-syariah, (Kairo : Musthafa Muhammad, t.th) Jilid 2, h. 374

⁸¹ Departemen Agama, Op.,Cit, h. 602

orang yang lapar tersebut adalah Allah SWT, Jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah SWT, Bekerja merupakan sarana dari Allah SWT.

- c. Menghilangkan rasa takut membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian dari proses mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat meliputi :

- a. Dharuriyat, Kesejahteraan manusia di Dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Hajiyyat, memudahkan kehidupan. menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. Tahsinayat, Usaha melakukan hal yang terbaiuk untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Abd Rauf Wajo, tentang kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor Usaha Mikro (studi pada BMT yaumi di Ternate). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan dana BMT Yaumi terhadap sektor usaha mikro dilakukan dalam beberapa tahapan, pertama: pengenalan

persyaratan administrative, kedua: wawancara dilakukan untuk menganalisa permohonan pembiayaan nasabah, ketiga: observasi atau studi kelayakan dilakukan oleh petugas BMT Yaumi.

Rani Ernawati, “Analisis akad pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat”. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh dan terbukti, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan.⁸²

Ainah Rahmawati, “Analisi penyaluran pembiayaan bank syariah mandiri kantor cabang pembantu di kabupaten kota baru (januari 2013 - desember 2013)”. Penelitian ini membahas tentang penyaluran pembiayaan yang ada di BSM kantor cabang pembantu dikabupaten kota baru, Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti, Analisis ini dilakukan dengan cara

⁸² Rani Ernawati, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, “Analisis akad pembiayaan mdharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat”.

menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam produk pembiayaan investasi dan modal kerja pihak bank tidak menggunakan akad mudharabah tetapi memakai akad murabahah. Padahal akad murabahah adalah akad dalam jual-beli, hal inilah yang juga mungkin menjadi penyebab tidak tercapainya target dalam penyaluran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang di Banjarmasin.⁸³

Muzammir, tentang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Islam, dalam penelitian ini ada dua pokok bahasan yaitu: bagaimana peran pemerintah dalam usaha memberdayakan UKM dan bagaimana tujuan hukum Islam tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini sifatnya kajian pustaka, hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UKM. karena perkembangan UKM sangat vital dan menentukan upaya tercapainya proses keadilan sosial. Dari segi tinjauan hukum Islam peran pemerintah dalam memberikan layanan terbaik terhadap kelompok UKM adalah satu hal yang wajib.⁸⁴

Muhammad Agus Rahmadi, tentang upaya dan peran BMT dalam peningkatan posisi ekonomi rakyat yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah “Matahari” Majenang kabupaten Cilacap. Menurut asumsi peneliti, BMT ini

⁸³ Ainah Rahmawati, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Analisi penyaluran pembiayaan bank syariah mandiri kantor cabang pembantu di kabupaten kota baru (januari 2013 - desember 2013)”.

⁸⁴ Muzammir, UIN Sunan Kalijaga, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Dalam Perspektif Hukum Islam.

telah menunjukkan performancinya yang baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga alternative bagi masyarakat terutama yang menjadi nasabah BMT “Matahari” dalam kerja sama kemitraan bisnis. Dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan, pertama BMT “Matahari” mampu menjadi sebuah lembaga yang capable. Kedua, kredibilitas dapat teruji dengan perannya yang signifikan dan performancinya yang layak diperhitungkan. ketiga, pola ikir masyarakat yang mulai sadar terhadap kualitas kinerja BMT “Matahari” dengan respon yang positif.⁸⁵

Noval Ramadhan, “ peran baitul mal wat tamwil terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Cireundeu”. Jenis penelitian deskriptif, yakni yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, buku-buku dan angka-angka, laporan penelitian akan berupa kutipan-kutipan atau untuk memberikan gambaran laporan penyajian tersebut. adapun hasil dari penelitian ini adalah pedagang kecil ataupun masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah relative sangat sulit, maka BMT UMJ mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.⁸⁶

Dari enam skripsi di atas ada yang memberikan hasil positif, dari skripsi yang pertama meneliti tentang pembiayaan mudharabah. berbeda dengan dengan skripsi yang akan penulis buat hanya ditujukan pada pembiayaan

⁸⁵ Muhammad Agus Rahmadi, UIN sunan Kalijaga, Peran BMT Dalam Peningkatan Posisi Ekonomi Rakyat (studi pada BMT Muhammadiyah “Matahari” Cilacap).

⁸⁶ Noval Ramadhan, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ peran baitul mal wat tamwil umj terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Cireundeu”.

murabahah. Oleh sebab itu peneliti berkeyakinan bahwa skripsi yang ditulis sangat berbea dengan apa yang ada di skripsi terdahulu. Hal ini juga menjadi motivasi dan pendorong penulis karena berbedanya hasil dari pada keenam skripsi di atas tersebut.



BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

1. Sejarah berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha

BPRS ini beralamatkan Jl. Hayam Wuruk No. 95 Sawah Lama, Tanjung Karang timur, Bandar Lampung. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 13 Maret 2009 didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT BPR MITRA AGRO USAHA yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. PT BPR MITRA AGRO USAHA selanjutnya disingkat **Bank MAU**. Nama **Bank MAU** dipilih agar mempermudah masyarakat mengenal serta mengingat bank ini.

Adapun Para pendirinya :

1. Bp. A. Maulana
2. Ibu Yamsidar
3. Bp. Ciknan Sawak

Kemudian seiring berkembang pesatnya ekonomi syari'ah di Indonesia. BPR Mitra Agro Usahapun berkonversi menjadi BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung.

Adapun dasar Hukum berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung:

- a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No 11/155/DKBU tanggal 02 maret 2009.

- b. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01. Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009.
- c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No 12/17/KEP.GBI/DpG/2010 Tanggal 09 Maret 2010.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/Dpg/2013 Tanggal 23 Juli Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) *Menjadi* Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) PT. BPRS Mitra Agro Usaha.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-11535. AH.01.02. Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.⁸⁷

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha

- a. Visi : Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.
- b. Misi : Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.⁸⁸

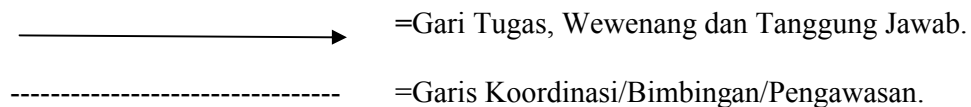
3. Struktur Pengurus BPRS Mitra Agro Usaha.

Struktur Organisasi tahun 2016 dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

⁸⁷. Dokumentasi Sejarah berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

⁸⁸. Dokumentasi visi misi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

⁸⁹. Dokumentasi Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.



4. Job description

Job description atau uraian pekerjaan adalah gambaran umum tugas pokok dan fungsi seseorang di dalam organisasi. Uraian pekerjaan merupakan pedoman pembagian kerja dan tanggung jawab didalam organisasi. PT BPRS MAU menuangkan *job description* itu pada suatu bentuk formulir yang mencantumkan tugas pokok maupun tugas tambahan yang di emban masing-masing personal yang ada di dalam organisasi PT BPRS MAU. Adapun uraian tugas masing-masing jabatan pada struktur organisasi di atas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan sebagai pemegang saham/pemilik saham, RUPS berhak untuk memutuskan berbagai keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. RUPS bertugas menentukan kebijakan bank, mengawasi jalannya operasional perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap semua karyawan terutama keputusan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi.

1) Komisaris

- a) Komisaris diangkat dan dihentikan oleh RUPS.
- b) Sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Direksi bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Direksi
- c) Memberi pertimbangan (persetujuan/menolak) terhadap usulan-usulan yang diajukan Direksi menyangkut permohonan pembiayaan yang melampaui wewenang Direksi, pengeluaran biaya dan pengambilan kebijakan-kebijakan.

- d) Menyampaikan laporan-laporan pengawasan yang dilakukan komisaris ke Bank Indonesia secara berkala (setiap 6 bulan).
- e) Memberi nasehat kepada direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha BPRS.
- f) Bertanggung jawab kepada RUPS atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan.

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Menyusun pedoman-pedoman menyangkut prinsip syariah bagi kegiatan operasional BPRS.
- b) Mengawasi operasional BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah.
- c) Memberikan pendapat hukum syariah atas pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan syariah yang disampaikan oleh BPRS.
- d) Sebagai perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional), mengawasi penerapan prinsip syariah pada BPRS.
- e) Mengkonsultasikan kepada DSN terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur di dalam fatwa DSN.

3) Direksi

- a) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
- b) Direksi bertanggung jawab kepada komisari terhadap kegiatan operasional
- c) Direksi menyusun rencana strategi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang

- d) Direksi mengarahkan sumber daya yang ada di dalam BPRS untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam rencana kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh RUPS
- e) Direksi menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, pemerintah setempat maupun instansi lain yang terkait dengan operasional Bank
- f) Direksi bertanggung jawab memelihara tingkat kesehatan Bank dan menghindari dari pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi membahayakan Bank

4) Komite Pembiayaan

- a) Membantu Direktur utama dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan untuk jumlah pembiayaan tertentu.
- b) Memberikan masukan kepada direktur utama dalam mengamalkan keputusan yang menyangkut pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu.
- c) Bertanggung jawab atas kelayakan permohonan pengajuan pembiayaan calon mitra Bank yang di sajikan oleh *account officer*.

5) Manajer Marketing

- a) Membawahi unit *Account Officer*, *Funding Officer*, dan Administrasi Pembiayaan.

- b) Membantu direksi dalam mengatur dan memelihara pembiayaan, pendanaan Bank meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien.
- c) Menyusun dan membuat rencana kerja dan program kegiatan dalam ruang lingkup pemasaran dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan.
- d) Mengkoordinir, mengatur, mengarahkan, membina, dan mengawasi semua personil yang di bawah berdasarkan sistem dan prosedur pembiayaan bank yang telah ditetapkan.

6) Manajer Operasional

- a) Membawahi unit umum dan personalia, *accounting*, *costumer servis*, kasir, kas kantor, *driver*, dan *office boy*.
- b) Membantu direksi dalam mengatur dan membeli serta memelihara likuiditas bank meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien.
- c) Menyusun dan membuat rancangan kerja dan program kegiatan dalam ruang lingkup operasional dan umum dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan.
- d) Mengatur, mengarahkan, membina dan mengawasi semua personal yang ada dibawah berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank yang ditetapkan.

- e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bagian operasional dan umum.⁹⁰

5. Prinsip Utama Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha berpegangan teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- a. Keimanan dan Takwa kepada ALLAH SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah kedalam kehidupan manusia.
- b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi, dan misi semua elemen BPRS MAU untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial
- c. Kekeluargaan, yaitu pengelola, pengurus serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- d. Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat kerja yang tinggi, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik.

6. Usaha Yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Maksud dan tujuan BPRS MAU ialah menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha yang dijalankan oleh BPRS MAU adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka berdasarkan prinsip tabungan *mudharabah* dan bentuk lainnya berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.

⁹⁰ Destalia Anggraini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), hlm. 78

- b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro (kecil), koperasi serta perseorangan maupun kelompok.
- c. Melakukan penyaluran dana
- d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
- e. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain, Bank Umum, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Produk Tabungan BPRS Mitra Agro Usaha

BPRS Mitra Agro Usaha sejak akhir tahun 2013 telah menjalankan akad

⁹¹:

1. Tabungan

a. Tabungan MAU Syari'ah iB berakad Wadi'ah

Tabungan MAU Syariah iB berakad wadi'ah merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh BPRS Mitra Agro Usaha. BPRS MAU menerima tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas, dengan akad wadi'ah yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar

⁹¹. Dokumentasi Produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang diperhitungkan tiap bulan.

b) Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah

Tabungan MAU Syariah iB berakad *mudharabah*, merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* dimana BPRS MAU bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*). Pada BPRS MAU pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

Berikut ini adalah keuntungan yang didapat menabung di BPRS Mitra Agro Usaha:

- (1) Aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).
- (2) Bebas, biaya administrasi bulanan.
- (3) Layanan, layanan yang diberikan oleh BPRS MAU adalah dapat dengan jemput bola..
- (4) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.

2. Persyaratan menabung di BPRS MAU

a) Persyaratan Perseorangan

- (1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- (2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,-(MAU Syari'ah Ib) dan minimal Rp.10.000,-(MAU Syariah iB Cerdas)

- (4) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-(M AU Syariah iB) dan minimal Rp. 5.000,-(MAU Syariah iB Cerdas).

b) Persyaratan Perusahaan

- (1) Fotokopi akta pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar, berikut AD Perubahannya.
- (2) Fotokopi SIUT,SITU, TDP dan NPWP.
- (3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (4) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-.

3. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan Investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BANK MAU Syariah.

Keuntungan

- 1) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 2) Bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- 4) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.

Persyaratan

- 1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

3) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-.

8. Mekanisme Pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung⁹²

Produk pembiayaan di BPRS MAU :

1) Pembiayaan MAU Syariah iB Murabahah

Pembiayaan MAU Syariah iB Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berakad murabahah, dimana BPRS MAU menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku buat modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus keuntungan pada saat jatuh tempo).

2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa

Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana BPRS MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

3) Persyaratan Pembiayaan

- a. Pas photo 3x4 terbaru 1 lembar
- b. FC KTP suami/istri yang masih berlaku 5 lembar
- c. FC surat nikah 2 lembar
- d. FC kartu keluarga 2 lembar
- e. FC rekening listri (2 bulan terakhir) 2 lembar
- f. FC PBB terakhir 2 lembar

⁹² Dokumentasi Produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

- g. FC NPWP (>50jt) 2 lembar
- h. FC SIUP/SITU/SKU 2 lembar
- i. FC agunan SHM/BPKB 2 lembar
- j. FC STNK 3 lembar

Memiliki jaminan berupa:

- a. Asli SHM (sertifikat hak milik) 2 lembar
- b. Asli AJB(akta jual beli) 2 lembar
- c. Asli BPKB Motor/mobil

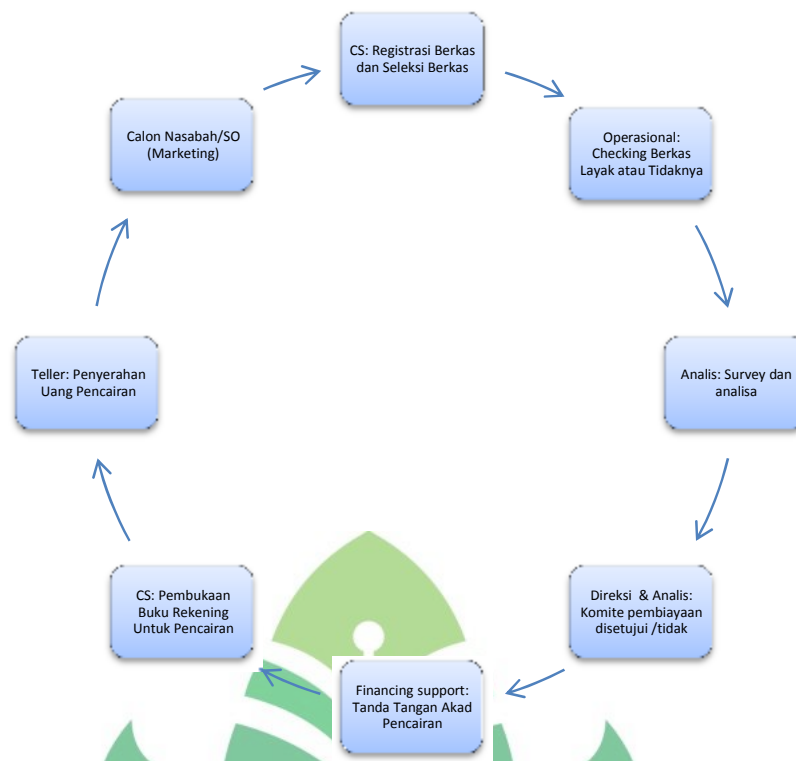
4. Data Nasabah Pembiayaan di BPRS MAU⁹³

- a. dari tanggal 1 Januari 2014 sampai sekarang:
- d. Piutang murabahah kolektif sebanyak 316 nasabah
- e. Piutang Murabahah umum sebanyak 460 nasabah
- f. Piutang Multijasa sebanyak 253 nasabah

5. Mekanisme Pembiayaan di BPRS MAU⁹⁴

⁹³ Agritia Gita Pratiwi, “Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha. Bandar Lampung”. Wawancara Tanggal 20 Febuari 2017

⁹⁴ Agritia Gita Pratiwi, “Direktur BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”. Wawancara Tanggal 20 Febuari 2017.



a. Calon nasabah/SO

Tahap ini adalah tahap pertama dimana calon nasabah baru pertama bertemu marketing atau datang ke BPRS nya langsung. Tahap ini untuk penentuan akad yang mana yang akan dan proses pertama dalam pembiayaan.

b. CS registrasi berkas dan seleksi berkas

Pada tahap ini nasabah menyerahkan berkas awal kepada CS, kemudian CS memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh nasabah, baik kelengkapan berkas dan pengisian berkas. Hal ini dilakukan selagi nasabah masih berada di BPRS.

c. Operasional checking berkas

Tahap ini dilakukan pengecekan berkas layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan, tahapan ini dapat diproses paling lama 3 hari kerja.

d. Analis

Pada tahap ini setelah lolos seleksi berkas dan layak mendapatkan pembiayaan dari BPRS maka akan dilakukan servey dan analisa langsung kerumah atau tempat usaha dari nasabah yang dilakukan oleh credid investigasi yang akan menentukan apakah layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan.

e. Direksi dan Analis

Ditangan direksi dan analislah pembiayaan ini disetujui atau tidaknya jika memang direksi memberikan acc maka pembiayaan tersebut akan diberikan kepada nasabah. tahapan ini dilakukan setelah analis melakukan survey terhadap nasabah.

f. Financing Support

Hal ini melakukan tahapan akad dan pencairan setelah diacc oleh direksi dan analis, pada tahap ini nasabah menandatangani akad dan mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah.

g. CS pembukaan buku rekening

Hal ini dilakukan supaya nasabah pembiayaan terdaftar sebagai nasabah tetap BPRS MAU sehingga memudahkan nasabah untuk pencairan dan proses selanjutnya, penabungan maupun pembayaran pinjaman.

h. Teller

Tahapan ini adalah tahapan terakhir, dimana teller memberikan dana tunai kepada nasabah dan nasabah mendapatkan dana pembiayaannya.

B. Karakteristik Responden

a. Usia Responden

Data mengenai umur responden disini peneliti mengelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan diatas 40 tahun. Adapun data mengenai umur responden adalah sebagai berikut :

Tabel I
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	<20 tahun	1	2.27%
2	21-30 tahun	2	4.54%
3	31-40 tahun	24	54.55%
4	>41 tahun	17	38.64%
Total		44	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun 1 orang atau sebesar 2.27%, responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 4.54%, responden yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 54.55%, dan responden yang berusia diatas 41 tahun berjumlah 17 orang

atau sebesar 38.64% dari keterangan diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yang diambil berusia 31-40 tahun.

b. Pendidikan Responden Terakhir

Tabel II

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/MI Sederajat	1	2.27%
3	SMP/Mts Sederajat	7	15.91%
4	SMU/SMK/MAN Sederajat	35	79.55%
5	Diploma I / Diploma III	1	2.27%
Total		44	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden sebagian besar adalah SMU/SMK/MAN Sederajat berjumlah 35 orang atau sebesar 79,55%. Sedangkan responden yang SD/MI Sederajat berjumlah 1 orang atau sebesar 2.27%, SMP/Mts Sederajat berjumlah 7 orang atau sebesar 15.91%, Diploma I/Diploma III berjumlah 1 orang atau sebesar 2.27%.

c. Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Uaha Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel III

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumah	Presentase (%)
1	Laki-laki	21	47.72%
2	Perempuan	23	52.28%
Total		44	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin responden nasabah BPRS Mitra Agro Uaha Bandar Lampung yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang atau sebesar 47.72% dan perempuan berjumlah 23 orang atau sebesar 52.28%. Dari keterangan diatas menunjukan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

d. Penghasilan Responden Perbulan

Tabel IV

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Penghasilan Perbulan

No	Penghasilan Perbulan	Jumlah	Persentase (%)
1	Rp. 500.000- Rp. 1.500.000	5	11.36%
2	Rp.1.500.000- Rp.2.500.000	7	15.91%
3	Rp.2.500.000- Rp. 3.500.000	17	38.64%

4	>Rp.3.500.000	15	34.09%
Total		44	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penghasilan nasabah yang diambil menjadi responden adalah berkisar antara Rp. 2.500.000- Rp. 3.000.000 yaitu berjumlah 17 orang atau sebesar 38.64%, sementara diatas Rp. 3.500.000 berjumlah 15 orang atau sebesar 34.09%, Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 berjumlah 7 orang atau sebesar 15.91%, Rp. 500.000- Rp. 1.500.000 5 orang atau sebesar 11.36%.

C. Karakteristik Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan pembagiannya: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pembiayaan dan Kesejahteraan.

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada bagian BPRS terdapat 4 pertanyaan untuk 44 responden nasabah pembiayaan UMKM dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya:

Tabel V

Jawaban Responden

No	PERTANYAAN	Jawaban Ya/Tidak

	Tentang BPRS Mitra Agro Usaha		
1	Apakah BPRS MAU menjalankan simpanan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ?	43	1
2	Apakah BPRS MAU menerima dana tabungan ?	44	
3	Apakah BPRS MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah ?	44	
4	Apakah anda mengetahui BPRS MAU berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) ?	35	9

- 1) Apakah BPRS MAU menjalankan simpanan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ? Dari 44 responden sebanyak 43 menjawab YA atau sebesar 97.72% dan 1 responden menjawab TIDAK atau sebesar 2.28%.
- 2) Apakah BPRS MAU menerima dana tabungan ? Dari 44 responden semua menjawab YA atau sebesar 100%
- 3) Apakah BPRS MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah ? Dari 44 responden semua menjawab YA atau sebesar 100%
- 4) Apakah anda mengetahui BPRS MAU berbadan hukum perseroan terbatas ? Dari 44 responden sebanyak 35 responden menjawab Ya atau sebesar 79.54% dan 9 responden menjawab TIDAK atau sebesar 20.46% .

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan mengetahui tentang BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Pembiayaan

Pada bagian Pembiayaan terdapat 4 pertanyaan untuk 44 responden nasabah pembiayaan UMKM dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya:

Tabel VI
Jawaban Responden

No	Tentang BPRS	YA	TIDAK
1	Apakah anda menggunakan produk pembiayaan murabahah umum ?	44	0
2	Apakah anda menggunakan pembiayaan yang diberikan BPRS MAU sebagai modal usaha ?	44	0
3	Apakah anda membayar angsuran pokok dan margin yang telah disepakati ?	44	0
4	Apakah omset usaha anda meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS MAU ?	42	2

1) Apakah anda menggunakan produk pembiayaan murabahah umum ?

Dari 44 responden sebanyak 44 responden menjawab Ya atau sebesar 100%.

2) Apakah anda menggunakan pembiayaan yang diberikan BPRS MAU sebagai modal usaha ? Dari 44 responden sebanyak 44 responden menjawab YA atau sebesar 44%.

- 3) Apakah anda membayar angsuran pokok dan margin yang telah disepakati ? Dari 44 responden sebanyak 44 responden menjawab YA atau sebesar 100%
- 4) Apakah omset usaha anda meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS MAU ? Dari 44 responden sebanyak 42 responden menjawab YA atau sebesar 95.45% dan 2 responden menjawab TIDAK atau sebesar 4.65%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Tri Wahyudi sebagai pedagang sayuran dan ibu wartini sebagai pedagang pakaian yang ada di Pasar Tugu, Bapak Tri Wahyudi menggunakan modal pembiayaan dari BPRS MAU untuk membuka lapak sayuran untuk isterinya. Bapak Tri Wahyudi menjelaskan semulanya omset perhari berkisaran hanya Rp 500.000, Setelah mendapatkan tambahan modal dari BPRS MAU omset Tri Wahyudi dan isterinya perhari bertambah hingga Rp 1.000.000,. Ibu Wartini menerangkan bahwa omset perbulan ibu Wartini sebelum mendapat pembiayaan dari BPRS MAU sekitar Rp 10.000.000., setelah mendapat tambahan modal pembiayaan dari BPRS MAU omset ibu Wartini naik perbulan mencapai Rp 25.000.000., Ibu Wartini menjelaskan kegunaan modal yang dia pinjam dari BPRS MAU untuk menambah stok barang pakaian sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar serta trend barang yang sedang banyak dicari. Ibu wartini menambahkan pada saat belanja

untuk stok pakaian akan lebih murah karna membeli dengan porsi yang banyak sehingga harga lebih murah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan produk pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasabah.

c. Kesejahteraan

Pada bagian kesejahteraan terdapat 8 pertanyaan untuk 44 responden nasabah pembiayaan UMKM dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya:

Tabel VII

Jawaban Responden

	Tentang Kesejahteraan Bapak/IBU	YA	TIDAK
1	Apakah anda makan tiga kali dalam sehari ?	42	2
2	Apakah anda makan dengan lauk dan pauk ?	43	1
3	Apakah anda selalu menyempatkan liburan keluarga ?	19	25
4	Apakah anda mengikuti asuransi jiwa atau semacamnya ?	10	34
5	Apakah anda selalu menabung setiap bulannya ?	42	2
6	Apakah anda memiliki rumah sendiri ?	37	7
7	Apakah rumah anda berdinding beton ?	40	4
8	Apakah rumah anda memiliki lantai ?	43	1

- 1) Apakah anda makan tiga kali dalam sehari ? Dari 44 responden sebanyak 42 responden menjawab YA atau sebesar 95.45% dan 2 responden menjawab TIDAK atau sebesar 4.65%.
- 2) Apakah anda makan dengan lauk dan pauk ? Dari 44 responden sebanyak 43 responden menjawab YA atau sebesar 97.72% dan 1 responden menjawab TIDAK atau sebesar 2.28%.
- 3) Apakah anda selalu menyempatkan liburan keluarga ? Dari 44 responden sebanyak 19 responden menjawab YA atau sebesar 43.18% dan 25 responden menjawab TIDAK atau sebesar 56.82%.
- 4) Apakah anda mengikuti asuransi jiwa atau semacamnya ? Dari 44 responden sebanyak 10 responden menjawab YA atau sebesar 22.72% dan 34 responden menjawab TIDAK atau sebesar 77.28%.
- 5) Apakah anda selalu menabung setiap bulannya ? Dari 44 responden sebanyak 42 responden menjawab YA atau sebesar 95.45% dan 2 responden menjawab TIDAK atau sebesar 4.65%.
- 6) Apakah anda memiliki rumah sendiri ? Dari 44 responden sebanyak 37 responden menjawab YA atau sebesar 84.09% dan 7 responden menjawab TIDAK atau sebesar 15.91%.
- 7) Apakah rumah anda ber dinding beton ? Dari 44 responden sebanyak 40 responden menjawab YA atau sebesar 90.90% dan 4 responden menjawab TIDAK atau sebesar 9.1%.

- 8) Apakah rumah anda memiliki lantai ? Dari 44 responden sebanyak 43 responden menjawab YA atau sebesar 97.72% dan 1 responden menjawab TIDAK atau sebesar 2.28%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan murabahah umum dapat dikatakan sejahtera. Semua penjabaran responden diatas menjelaskan bahwa Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, sangat berpotensi baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. oleh karena itu Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berdampak positif yang memiliki potensi cukup besar jika terus dikembangkan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Mekanisme Pembiayaan Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Produk-produk pembiayaan:

1. Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka.⁹⁵
2. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian secara pengusaha dengan baik, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama.⁹⁶
3. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). murabahah hampir sama dengan bai' bitsaman ajil (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.⁹⁷ Produk murabahah ini diterapkan di BPRS MAU menyediakan untuk pembelian bahan baku buat modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali

⁹⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 45

⁹⁶ Ibid, hlm. 45

⁹⁷ Ibid, hlm. 45

oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus keuntungan pada saat jatuh tempo).

4. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya (bridging financing) yang didasarkan atas akad pembiayaan bai salam.⁹⁸ Jenis produk ini juga dipakai oleh BPRS MAU berupa produk multijasa, pembiayaan yang memakai akad ijarah atau kafalah dimana BPRS MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah guna memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Proses pengajuan pembiayaan mengacu kepada prosedur umum pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Masing-masing Bank.

1. Pengajuan Pembiayaan, dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS MAU dari hasil pengumpulan data bahwa BPRS MAU memberikan persyaratan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Pas photo 3x4 terbaru 1 lembar
 - b. FC KTP suami/istri yang masih berlaku 5 lembar
 - c. FC surat nikah 2 lembar
 - d. FC kartu keluarga 2 lembar

⁹⁸ Ibid., hlm. 45

- e. FC rekening listri (2 bulan terakhir) 2 lembar
- f. FC PBB terakhir 2 lembar
- g. FC NPWP (>50jt) 2 lembar
- h. FC SIUP/SITU/SKU 2 lembar
- i. FC agunan SHM/BPKB 2 lembar
- j. FC STNK 3 lembar

Hal ini sesuai dengan standar proses pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK, Pengajuan pembiayaan, nasabah membuat surat permohonan pembiayaan dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh bank.⁹⁹

2. Verifikasi calon dokumen nasabah juga dilaksanakan oleh BPRS MAU dimana jaminan yang diterima oleh BPRS MAU berupa:
 - a. Asli SHM (sertifikat hak milik) 2 lembar
 - b. Asli AJB(akta jual beli) 2 lembar
 - c. Asli BPKB Motor/mobil

Hal ini juga sesuai proses standar ketentuan OJK tentang jaminan, Pihak bank akan memeriksa dokumen dan memeriksa usaha serta nilai jaminan yang diajukan nasabah, Pihak bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.¹⁰⁰

Persetujuan Pengajuan Pembiayaan, Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan surat persetujuan prinsip Pembiayaan kepada calon nasabah (*offering letter*) dan apabila nasabah dinyatakan tidak

⁹⁹ <http://OJK.go.id>

¹⁰⁰ <http://OJK.go.id>

layak, maka pihak Bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah.¹⁰¹ Ditangan direksi dan analislah pembiayaan ini disetujui atau tidaknya jika memang direksi memberikan acc maka pembiayaan tersebut akan diberikan kepada nasabah. tahapan ini dilakukan setelah analis melakukan survey terhadap nasabah.

Dari analisis di atas menunjukan bahwa mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BPRS MAU sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau peraturan yang dibuat oleh OJK, sehingga dalam hal ini BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

Bank Syari'ah di Indonesia, menurut pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syari'ah. Demikian ditentukan menurut pasal (5) ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Yang akan menjadi fokus dalam hal ini adalah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Menurut pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syari'ah, BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain, bisa juga

¹⁰¹ <http://OJK.go.id>

dengan cara investasi berupa deposito atau tabungan dengan bentuk lainnya.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan lainnya.¹⁰²

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal bank perkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.¹⁰³

BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.¹⁰⁴ BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah suatu lembaga keuangan perbankan. Menurut data yang didapat membuktikan bahwa eksistensi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sangat cukup dikenal kalangan pelaku UMKM di Bandar Lampung. Hal ini terbukti dari data yang didapatkan sebanyak 97.72%

¹⁰² Ibid, h. 106.

¹⁰³ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014), h 46.

¹⁰⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta :Kencana Prenada media Group , 2014), h. 62.

responden mengetahui produk simpanan dan tabungan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di dapat hasil bahwa sebanyak 54.54%% nasabah responden pembiayaan BPRS Mitra Agro Usaha berpenghasilan sedang, diikuti sebanyak 34.1% berpenghasilan tinggi diatas Rp 5.000.000., dan sebanyak 11.36% berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai dengan hasil SPKPM 2009 tingkat pendapatan perbulan yang dikatakan sejahtera adalah:

- 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000.)
- 2) Sedang (Rp.1.000.000.-Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp.1.000.000)

Hal ini membuktikan bahwa nasabah yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha dapat dikatakan sejahtera dari segi penghasilan.

Dari hasil angket yang mencapai 100% dari 44 responden yang menggunakan pembiayaan sebagai modal usaha tambahan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan merupakan sistem penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya pemberian kredit bank konvensional ke nasabahnya, kredit atau pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga maupun nasabah

Nasabah pembiayaan UMKM yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 95.45% menyatakan omset usahanya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Mitra Agro Usaha. Hal ini sesuai dengan tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. pihak yang kelebihan dana menyalurkan kepada pihak kekurangan dana, sehingga dapat tergulirkan.

Dengan adanya BPRS akan memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BPRS kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil.

C. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Kesejahteraan ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia yang sebaik-baiknya. Secara

singkat kesejahteraan mengandung pengertian, pertama adalah aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan seseorang atau masyarakat dalam dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.

Terdapat banyak upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian industri kecil itu sendiri adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh perorangan, rumah tangga ataupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang kecil. Untuk mencapai kesejahteraan maka perlu dilakukan sebuah usaha yang harus dilakukan oleh manusia, bahkan diwajibkan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup individu juga keluarga, dan mintalah rizki kepada sang pemberi rizki yaitu Allah SWT. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat toha ayat 132 sebagai berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ إِنَّا نَنْزِلُكَ الرِّزْقَ وَالْعِشْيَةَ
لِلْعَالَمِينَ ۝ ١٣٢

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”

As-Syatibi mengatakan bahwa penetapan huku syara’ selalu berorientasi pada kepentingan hidup manusia. kepentingan atau kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dharuriyat, hayiyat dan tahsiniyat.

1. Dharuriyat

Dari data yang ada menunjukan bahwa pelaku UMKM sudah memenuhi kebutuhan dharuriyat dengan mempunyai tempat tinggal dari 44 responden sebanyak 84.09% memiliki rumah sendiri, makan sehari tiga kali dari 44 responden sebanyak 95.45% sudah terpenuhi dan mempunyai penghasilan sebagai pelaku UMKM sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yakni nafkah-nafkah pada manusia untuk dapat mewujudkan lima tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa, akal, keyakinan atau agama, keturunan dan harta benda. Hal ini sesuai dengan pengertian dari dharuriyat itu sendiri yakni penegakan permasalahan agama dan dunia, artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. dharuriyat menunjukan kebutuhan dasar, ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia,

2. Hajiyyat

Dengan adanya pembiayaan dari BPRS MAU pelaku UMKM tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok primer saja, namun berdampak langsung dalam memberikan kemudahan dalam mencari nafkah dalam keluarga. Data yang didapat sebanyak 22.72% belum memiliki asuransi jiwa atau untuk menjamin kesehatan dan keamanan. Hal ini seiring dengan pengertian dari hajiyyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan menambah value atau nilai kehidupan manusia.

3. Tahsiniyat

Para pelaku UMKM masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan tahsiniyat atau kesempurnaan, misalnya melakukan liburan keluarga sebanyak 43.18% dari 44 responden selalu menyempatkan liburan keluarga. Hal ini sesuai dengan arti dari tahsiniyat adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Dengan demikian jelas bahwa taraf kesejahteraan pelaku UMKM di dalam ekonomi islam hanya sampai pada taraf pemenuhan kesejahteraan dharuriyat (primer). Sedangkan hajiyyat (sekunder) berbanding terbalik

dengan tahsiniyat (tersier), dimana para pelaku UMKM lebih mementingkan kebutuhan tahsiniyat dari pada hajiyyat yang dibuktikan dari data yang mengutamakan hajiyyat sebanyak 22.72% dan tahsiniyat sebanyak 43.18% dari 44 responden. Hal ini berbanding terbalik dengan ajaran dalam ekonomi Islam yang mengutamakan hajiyyat dari pada tahsiniyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan BPRS Mitra Agro Usaha.

Meskipun Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah belum terlalu banyak khususnya di Bandar Lampung, tetapi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM. Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BPRS MAU sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau peraturan yang dibuat oleh OJK, sehingga dalam hal ini BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Peran BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

Dengan adanya BPRS akan memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan nasabah pembiayaan UMKM yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 95.45% menyatakan omset usahanya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Mitra Agro Usaha. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BPRS kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha.

Keberadaan BPRS diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi.

3. Kesejahteraan pelaku UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Taraf kesejahteraan pelaku UMKM di dalam ekonomi islam hanya sampai pada taraf pemenuhan kesejahteraan dharuriyat (primer). Sedangkan hajiyyat (sekunder) berbanding terbalik dengan tahsiniyat (tersier), dimana para pelaku UMKM lebih mementingkan kebutuhan tahsiniyat dari pada hajiyyat yang dibuktikan dari data yang mengutamakan hajiyyat sebanyak 22.72% dan tahsiniyat sebanyak 43.18% dari 44 responden. Hal ini berbanding terbalik dengan ajaran dalam ekonomi Islam yang mengutamakan hajiyyat dari pada tahsiniyat.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saran untuk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ditingkatkan penyuluhan tentang pengetahuan mekanisme dalam pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, sehingga masyarakat bisa lebih paham mengetahui pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Untuk mahasiswa

Perbanyak untuk membaca referensi yang terpercaya dan carilah sesuatu hal yang mengasyikan untuk dipelajari. Bukan hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas semata.

3. Saran untuk umum..

Dilihat dari hasil dari kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam persfpektif ekonomi islam bahwa, masyarakat pelaku umkm rata-rata lebih besar mendahulukan tahsiniyat dari pada hajiyyat. Berbanding terbalik dengan ketentuan Islam yang lebih mengutamakan Hajiyyat dari pada tahsiniyat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, et. al. *Bukhara Tajwid dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Quran. 2007).
- Adi fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung, Rafika Aditama, 2012.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana Prenada media Group . 2014.
- Bahrudin dan Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yokyakarta, UPPSTM YKP, 2002.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta,: Bumi Aksara. 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002.
- Destalia Anggraini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016).
- [Http://m.antaranews.com/berita/459832/umkm-lampung-harap-presiden-joko-widodo-tingkatkan-pasar-nasional](http://m.antaranews.com/berita/459832/umkm-lampung-harap-presiden-joko-widodo-tingkatkan-pasar-nasional).
- Http://.OJK.go.id.
- Kamsir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002.

Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, Jakarta : Salemba Empat. 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta, Ekonis, 2003.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: 2011, Raja Grafindo Persada.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia. 2001.

Rahmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafika, Jakarta, 2012.

Rivai.Veithzal, Dkk , *Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (Depok : Raja Grafindo Persada), 2013.

Sub Direktorat Analis Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan* 2000, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadia Group. 2014.

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009.

Undang-undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

M.Umar Chapra, *Toward A Jus Monetary System*, Alih Bahasa Ikhwan Abiding Basri, Sistem Ekonomi Islam, Gema Insani Press. Jakarta:2000.

Universitas Sumatera Utara, *Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* (online) tersedia di <http://responsitori.usu.ac.id>.

Veithzal Rifai dan Andria Pertama, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005.

W.J.S Poerwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Bandung:Mizan, 1996.

Yusuf Qardhdawi, *Norma dan Etika Eknomi Islam*, Jakarta: Gema Insani. 2000.

PHOTO-PHOTO PENGISIAN KUESIONER TERHADAP NASABAH
PEMBIAYAAN UMKM BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG





